

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. WBP akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani masa pidananya. Selama masa pidananya, narapidana memiliki hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar LAPAS. Pembinaan yang dimaksud terdiri atas Pembinaan kepribadian, yaitu diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian, yaitu diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja serta produksi. Kegiatan Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala LAPAS. Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk tersebut bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan harus mengikuti ketentuan tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali yang telah diatur lebih lanjut sesuai Permenkumham No.M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

Kegiatan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerja sama antar instansi Pemerintah yang terkait. Termasuk diantaranya dapat mengadakan kerja sama dengan UPT Pemasyarakatan lain atau badan kemasyarakatan lainnya. Kerja sama juga terbuka dengan perseorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan dalam wilayah LAPAS selama menjalani putusan masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan yang terdiri dari: Tahap awal (Dilaksanakan di LAPAS) Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi: Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan (Dilaksanakan di LAPAS) Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi Perencanaan program pembinaan lanjutan; Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan Perencanaan serta pelaksanaan program asimilasi. Tahap akhir (Dilaksanakan di luar LAPAS oleh Bapas) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Adapun Pembinaan tahap akhir, meliputi Perencanaan program integrasi; Pelaksanaan program integrasi; dan Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan

data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil litmas. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS telah disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tertentu. Bagi Narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir, maka Narapidana yang bersangkutan tetap melaksanakan pembinaan di LAPAS. Apabila terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Meskipun program pembinaan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai kendala. Program ini biasanya mencakup berbagai pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membantu narapidana mempersiapkan diri mereka setelah masa hukuman berakhir. Namun, meskipun rencana yang disusun sangat komprehensif dan terstruktur, dalam praktiknya ada berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas program tersebut salah satunya yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 kota Makassar. Salah satu kendala-kendala yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Makassar ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar tujuan utama dari program pembinaan dapat tercapai dengan baik.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya peralatan, bahan-bahan, dan tenaga pengajar yang diperlukan untuk mendidik keterampilan narapidana. Alat-alat yang diperlukan sering kali terbatas dan tidak dalam kondisi yang baik. Begitu pula dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelatihan, sering kali tidak tersedia atau tidak mencukupi. Selain itu, jumlah tenaga pengajar yang kompeten dan berpengalaman juga sangat terbatas, sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan optimal.

Selain masalah fasilitas dan tenaga pengajar, tidak semua narapidana memiliki minat atau bakat dasar dalam keterampilan yang diajarkan. Program pembinaan biasanya mencakup berbagai jenis keterampilan, mulai dari kerajinan tangan hingga teknologi informasi. Namun, banyak narapidana yang tidak tertarik atau tidak memiliki kemampuan dasar dalam bidang-bidang tersebut. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan

memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Kurangnya minat dan bakat ini menjadi tantangan besar dalam implementasi program pembinaan.

Karena berbagai kendala tersebut, banyak narapidana yang akhirnya mengajukan pengunduran diri dari program pembinaan. Mereka merasa bahwa program tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, padahal pembinaan yang diterima oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sangat penting karena selain untuk menyadarkan narapidana agar mereka bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali pembinaan ini juga dilakukan bertujuan untuk mengembalikan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana serta memanfaatkan ilmu pembinaan yang telah mereka dapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidanan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pada lingkungannya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar untuk mengevaluasi dan mengatasi kendala-kendala ini agar program pembinaan dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar Makassar sehingga masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi konteks dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?
2. Bagaimana evaluasi masukan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?
3. Bagaimana evaluasi proses dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?
4. Bagaimana evaluasi produk dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi masukan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?
2. Untuk menganalisis dan mengetahui evaluasi proses dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi proses dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi produk dalam pelaksanaan program pelatihan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar?

Manfaat Penelitian, yaitu :

1. Teoritis:

- Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dengan melakukan uji komparasi terhadap penerapannya secara nyata di masyarakat.
- Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Program pelatihan kerja Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar.

2. Praktis:

- Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan menginterpretasi hasil dari suatu penelitian secara lebih mendalam.
- Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan informasi di LAPAS Kelas 1 Kota Makassar.

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008:55) Secara sederhana kebijakan publik dapat definisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya dibuat oleh pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik juga merupakan suatu strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicitakan-citakan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik islam suatu kebijakan yang di atur oleh pemerintah yang dalam hal ini berwenang untuk melaksanakan kepentingan negara. Keputusan tersebut membawadampak yang besarkarenapernyataan

yang di atur oleh pemerintah.

1.2.2. Konsep Evaluasi

Menurut Juliastuti & Andriani (Wilsa & Cahyono, Hal 26:2023) Evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur derajat keberhasilan suatu program yang sudah dilaksanakan dan dipergunakan untuk meramalkan, memperhitungkan serta untuk mengendalikan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan. Selain itu dikemukakan oleh Suharto bahwa evaluasi dilakukan baik terhadap suatu proses maupun hasil dari implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan serta sejauh mana program dan pelayanan sosial. Dengan demikian, maka evaluasi bisa disimpulkan yaitu suatu aksi atau kegiatan direncanakan agar mengetahui keadaan gambaran objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya yang telah dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk mendapatkan suatu kesimpulan. (Utari et al., Hal 614: 2021)

Evaluasi program adalah evaluasi yang telah dilakukan dalam mengkaji kembali draf/usulan program yang dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, selain bertujuan dalam mengkaji kembali keterkendalaan program dalam mencapai tujuan yang telah diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. (Masa et al., Hal 12: 2020. Adapun Menurut Try et al (Wilsa & Cahyono, Hal 26:2023) Evaluasi program merupakan sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

1.2.3. Model-model Evaluasi

1. Model Evaluasi Berbasis Tujuan

Menurut Ralph W. Tyler dalam Wirawan (2016) mendefinisikan evaluasi bahwa "...process of determining to what extent the educational objective are actually being realized" (Brikerhoff dalam Wirawan., 2016).

Model evaluasi Berbasis Tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan

atau objektif intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam rencana program. Objektif program kemudian dirumuskan dalam indikator-indikator kuantitas dan kualitas yang dapat diukur.

- b. Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator. Evaluator merumuskan tujuan program menjadi indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur. Indikator-indikator ini dirumuskan dalam pertanyaan evaluasi yang harus diukur dalam evaluasi.
- c. Mengembangkan metode dan data kuantitatif atau kualitatif. Evaluator menentukan apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau campuran.
- d. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan, Layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diharapkan.
- e. Menjaring dan menganalisis data mengenai indikator-indikator program.
- f. Kesimpulan. Mengukur hasil pencapaian program, atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan membandingkan dengan Objektif yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah terjadi ketimpangan.
- g. Mengambil keputusan mengenai program. Keputusan dapat berupa: Jika program dapat mencapai tujuannya sepenuhnya, mungkin program dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain jika sebelumnya hanya dilakukan di daerah tertentu.

2. Model Evaluasi Bebas Tujuan

Menurut Scriven dkk dalam Wirawan (2016). Mengemukakan bahwa pendekatan goal free evaluation model karena frustrasi tidak puas dengan temuan evaluasi yang tidak mampu menunjukkan pengaruh dari program yang dievaluasi. Walaupun program mengemukakan pengaruh yang diharapkan akan tetapi pengaruh tersebut gagal untuk ditemukan. Sedangkan pengaruh yang tidak diharapkan dan pengaruh yang tidak diantisipasi justru muncul ke permukaan dalam hasil evaluasi. Suatu program dapat mempunyai tiga jenis pengaruh yaitu:

- a. Pengaruh sampingan yang negatif. Yaitu pengaruh sampingan yang tidak telah dikehendaki oleh program. Ini seperti jika orang meminum

obat atau pengobatan yang sering mempunyai efek sampingan yang tidak dikehendaki. Misalnya, wanita yang diobati kanker payu daranya dengan menggunakan sinar X ray dapat berakibat rambutnya rontok. Dalam hal pelaksanaan program juga dapat terjadi efek sampingan.

- b. Pengaruh positif yang ditetapkan oleh tujuan program. Suatu program mempunyai tujuan dicapai ataupun oleh rencana program. Tujuan program merupakan apa yang akan dicapai atau perubahan atau pengaruh yang diharapkan dengan layanan atau perlakuan program.
- c. Pengaruh positifnya oleh perancang program. Akan tetapi, dalam pseudo evaluation tujuan dan pengaruh yang dikemukakan dalam program yang sesungguhnya disembunyikan.

3. Model Evaluasi Evaluasi Kotak Hitam (Black Box Evaluation Model)

Model Evaluasi Kotak Hitam (Black Box Evaluation Model) Semenjak abad ke-20 lahir gerakan konsumerisme di seluruh dunia. Konsumerisme adalah gerakan untuk melindungi produsen dari ibara konsumen yang selama ini telah dilang dirugikan Republik Indonesia. Black Box Evaluation Model sangat menolong para konsumen dalam membeli produk (barang dan jasa). Konsumen sudah mempunyai eputinformati untuk mengambil keputusan mengenai barang dan jasa sebelum membeli barang dan jasa yang diperlukannya. Dengan demikian, kemungkinan salah dalam memilih barang atau jasa yang akan dibelinya.

4. Model Evaluasi Responsif

Menurut Robert Stake dalam Wirawan (2016). Pada awalnya Stake menamai model evaluasi ini Countenance nama model ini sebagai Client-centered Evaluation atau evaluasi yang berpusat pada klien. Model stake evaluasi disebut responsif jika memenuhi tiga kriteria:

- lebih secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program,
- merespon persyaratan kebutuhan informasi dari audiens; dan
- perspektif nilai-nilai yang berdiri dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program Proses pelaksanaan Model Evaluasi Responsif.
- Proses tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Evaluator ialah mengidentifikasi jenis dan jumlah dari setiap pemangku

kepentingan (responden). Jika jenisnya terlalu banyak, maka harus diranking berdasarkan pentingnya setiap pemangku kepentingan bagi program.

- Evaluasi mengalami keterbatasan sumber dan waktu pelaksanaan evaluasi. Misalnya, dari identifikasi ditemukan 10 jenis pemangku kepentingan yang harus direspons. Dari 10 jenis itu diambil 4 jenis pertama dalam ranking. Dari 4 jenis pemangku kepentingan tersebut kemudian diidentifikasi jumlah setiap pemangku kepentingan. Dari jumlah tersebut kemudian ditarik sampel masing-masing pemangku kepentingan secara proporsional.
- Menyusun proposal evaluasi. Proposal evaluasi disusun dengan memerhatikan pendapat para pemangku kepentingan. Misalnya, pernyataan evaluasi dan jenis informasi yang akan dijangkau memerhatikan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan mengenai program.
- Melaksanakan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi di samping harus melakukan komunikasi dengan pimpinan dan staf program, evaluator harus juga melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
- Membahas hasil evaluasi dengan para pemangku kepentingan. Draf hasil evaluasi di samping dibahas dengan pimpinan dan staf proyek juga dibahas dengan para pemangku kepentingan. Masukan, kritik dan saran dari mereka sebanyak mungkin harus diperhatikan. Akan tetapi, dapat terjadi para pemangku kepentingan mempunyai pendapat yang bertentangan dan tak mungkin disatukan.
- Pemanfaatan hasil evaluasi. Evaluator mendorong para pemangku kepentingan untuk menerima dan memanfaatkan hasil evaluasi.

1.2.4. Program Pelatihan Kerja Narapidana

1.2.4.1. Konsep Program Pelatihan Kerja Narapidana

Pelaksanaan pelatihan kerja yang diadakan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk menghasilkan narapidana yang memiliki kemampuan baik secara intelektual, sikap dan perilaku serta memiliki kemampuan didalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreatifitas

dalam mengerjakan, mengubah, atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna. Ada berbagai kegiatan dalam program pelatihan kerja di lembaga pemasyarakatan yaitu garmen, pembuatan tempe, pembuatan kripik, bengkel, budi daya ikan lele, pertanian.

1.2.4.2. Tujuan Program Pelatihan Kerja Narapidana

Setelah pedoman pelaksanaan pelatihan kerja ini terbentuk, diharapkan penyelenggaraan pelatihan kerja ini berjalan secara efektif dan dapat menghasilkan narapidana yang mampu mengerjakan atau menciptakan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan ilmu atau keterampilan yang telah di peroleh.

1.2.4.3. Manfaat Program Pelatihan Kerja Narapidana

- Setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri sehingga mereka dapat berguna di tengah masyarakat;
- Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; dan
- Menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

1.2.4.4. Landasan Hukum

1. Undang undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara

Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan.

1.2.4.5. SOP LAPAS

Adapun untuk Standar Operasional Prosedurnya yaitu:

- a) Penempatan narapidana bekerja dilaksanakan secara terbuka, adil tanpa diskriminasi dan sesuai kebutuhan.
- b) Penempatan narapidana bekerja dipisahkan dengan penempatan bagi mereka yang belum mengikuti kegiatan kerja.
- c) Penempatan narapidana untuk bekerja diarahkan untuk menempatkan narapidana pada posisi yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Dimana adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan

Selain syarat-syarat diatas yang menjadi pertimbangan juga harus memperhatikan:

- a. Kondisi kesehatan berupa riwayat penyakit yang pernah diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dimana dalam hal ini adanya koordinasi dari pihak klinik Lapas Kelas I Makassar mengenai kondisi kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan bekerja.
- b. Kondisi Psikologis dari Warga Binaan Pemasyarakatan ini juga dibutuhkan laporan perkembangan dari Warga Binaan Pemasyarakatan baik itu dari Wali Warga Binaan Pemasyarakatan atau pun dari psikolog yang ada di Lapas Kelas I Makassar

1.2.5. PenelitianTerdahulu

Sebagai pertimbangan, penelitian ini tentunya melihat beberapa temuan dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik penelitian, Peneleitian terdahulu tersebut menjadi acuan penulis dan memperkaya penggunaan teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, beserta penjelasan relevansi dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1	Azka Nisaikamilah S (2020)	Sejauh ini pelaksanaan program pelatihan kerja GIATJA sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat namun jika ada perubahan situasi terkadang pelaksanaan SOP dapat tertunda, Sedangkan dalam standar proses pemberian layanan yang diberikan oleh program pembinaan oleh kemandirian GIATJA selama ini telah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat	Evaluasi proses program pembinaan kemandirian GIATJA bagi warga binaan pasyarakatan (WBP) Di lembaga pasyarakatan kelas 2 A Salemba	Relevansi penelitian ini, yaitu, meneliti tentang pelaksanaan program pemerintah dari segi teori evaluasi	Teori yang digunakan yaitu, teori evaluasi proses, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Daniel Stuffelebeam 2016 Lokus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 A Salemba, sedangkan penelitian ini di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Kota Makassar

2	Yousi Novita Pratiwi (2018)	Dari evaluasi yang telah dilakukan dalam empat tahap CIPP telah terdapat hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian yaitu, pertama terdapat keterampilan yang dilaksanakan di LAPAS namun belum dibentuk menjadi sebuah unit kerja sehingga narapidana dengan keterampilan tersebut membiayai secara pribadi seperti servis elektronik dan pengembangan bakat melukis, kedua yaitu dana pembinaan yang dianggarkan kurang adanya pemerataan	Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 Malang	Relevansi penelitian ini yaitu berfokus pada pelaksanaan pembinaan kemandirian	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Selain itu konsep pembinaan yang dilaksanakan juga berbeda karena penelitian sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana sedangkan penelitian ini terkait pelaksanaan program pelatihan
---	--------------------------------------	--	--	--	--

					kerja warga binaan
6* 3	Sartika Budi A (2013)	Terdapat faktor yang menghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal narapidana maupun dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai.	Evaluasi model pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Wanita Semarang	Relevansi penelitian ini yaitu berfokus pada pembinaan narapidana	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian

1.2.6. Kerangka Pikir

Terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Sesuai dengan model yang telah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka sebelumnya, tapi menurut peneliti teori yang sangat signifikan dan relevan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu menggunakan model evaluasi program CIPP. Model evaluasi yang dikemukakan oleh Danial Stufflebeam (1966) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi evaluasi, yaitu:

Evaluasi Konteks (context evaluation). Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

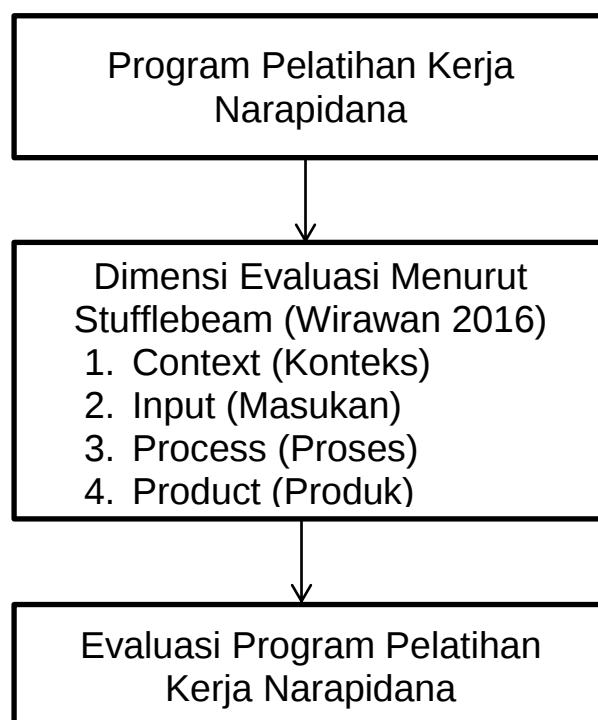
Evaluasi Masukan (Input evaluation). Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas dan membantu kelompok-kelompok

lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi cost effectiveness untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih di antara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas dan penganggaran.

Evaluasi proses (Process evaluation) . Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

Evaluasi Produk (Product evaluation). Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan- kebutuhan yang ditargetkan.

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar

Waktu dalam melakukan penelitian ini adalah selama satu bulan. Lamanya penelitian ini dilakukan agar perolehan data dan informasi yang didapatkan lebih akurat dan lebih mendalami permasalahan yang akan diteliti. Adapun Fokus penelitian berperan penting dan memandu proses penelitian agar tidak tertipu dengan banyaknya hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat tiga fokus penelitian yaitu, program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam buku Research Design, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemausahaan. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana pelaksanaan program Pelatihan Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar Dengan demikian, akan diperoleh informasi dan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar terkait penelitian ini.

2.2. Desain penelitian

Desain penelitian yang gunakan yaitu studi kasus yang dimana peneliti menganalisis program pelatihan kerja yaitu dengan cara mendeskripsikan fenomena secara mendalam untuk memperoleh informasi yang utuh dari permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program. Adapun informan penelitian yaitu:

- Kepala seksi bimbingan kerja
- Pengawas
- Narapidana

Adapun alasan peneliti memilih informan diatas karena informan

tersebut memiliki pengalaman atau pengetahuan spesifik mengenai topik yang sedang diteliti

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang peneliti lakukan selama proses penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:.

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi satu hari, di mana peneliti mengobservasi pada saat salah satu kegiatan program berlangsung. Peneliti bertindak sebagai pengawas kegiatan dimana saya mengamati proses kegiatan pembuatan kripik sampai selesai.

2. Wawancara

Peneliti memilih beberapa informan yang terlibat langsung dengan program pelatihan kerja narapidana, kemudian peneliti membuat kesepakatan dengan informan untuk berdialog dan melakukan pembahasan terkait program pelatihan kerja narapidana, dan saat wawancara peneliti mencoba menangkap sebanyak mungkin informasi yang bisa didapatkan dari informan dengan cara flexibel tanpa membebankan informan.

3. Telaah Dokumen (Dokumentasi)

Peneliti menyatakan bahwa selama proses melakukan penelitian, peneliti telah mengumpulkan dokumen yaitu berupa dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor/sekolah) serta dokumen privat (seperti, buku harian, surat, e-mail) yang berkenaan dengan tujuan penelitian ini.

4. Audio Visual

Peneliti juga menyatakan bahwa selama melakukan penelitian juga menggunakan metode pengumpulan data melalui Audio visual berupa gambar dan juga suara.

2.3.3. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data dalam hal ini ialah mempersiapkan data berupa data mentah, transkrip data lapangan, gambar dan sebagainya. Teknik ini terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.

Pada tahap ini peneliti memilah-milah dan menyusun data

lapangan ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data.

Pada tahap ini peneliti mencoba memahami cara membangun pengertian umum atas informasi yang diperoleh dan kemudian merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.

Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.

Pada tahap ini peneliti menyampaikan informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu. Peneliti juga membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Pada tahap ini peneliti membahas tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema.

2.3.4. Validitas dan Reabilitas Data

Peneliti melakukan pengecekan informasi serta data hasil wawancara antara penyelenggara program yaitu pihak LAPAS, dengan informasi dari narapidana sebagai penerima program pelatihan kerja narapidana.